

**PENERAPAN PSAK No. 27 TENTANG AKUNTANSI
PERKOPERASIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH No. 9
TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI KASUS PADA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA "LUGAS"**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

**RAIHAN FARANI
No. Pokok : 040013486 E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

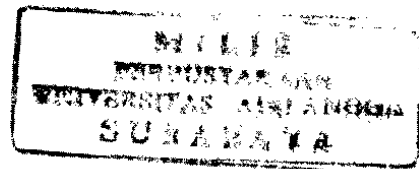
SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK No.27 TENTANG AKUNTANSI
PERKOPERASIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH No.9
TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI KASUS PADA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA "LUGAS"**

DIAJUKAN OLEH:

RAIHAN FARANI

No. Pokok : 040013486 E



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Dra. YUSTRIDA BERNAWATI, M.Si., Ak.

TANGGAL 29-7-2004

KETUA PROGRAM STUDI,


Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak.

TANGGAL 5-8-04

Surabaya,

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

Dra. YUSTRIDA BERNAWATI, M.Si., Ak.

ABSTRAK

Koperasi adalah bagian integral tata perekonomian nasional, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Tetapi masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh koperasi, akibatnya perannya menjadi tidak maksimal. Sumberdaya yang terbatas merupakan kelemahan utama koperasi, dan yang paling krusial adalah di bidang manajerial.

Kontribusi IAI terhadap pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia adalah penetapan standar akuntansi untuk koperasi yang dituangkan kedalam PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Pemerintah juga memiliki perhatian yang besar untuk memajukan perkoperasian di Indonesia. Salah satunya adalah melalui Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 27 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 pada KPRI "LUGAS" dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan KPRI "LUGAS". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan belum diterapkannya PSAK No.27 secara tepat. Ketidaksesuaian yang paling mendasar adalah dimasukkannya Akriva Titipan kedalam Neraca, karena akriva tersebut tidak dapat dianggap sebagai milik koperasi. Laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI "LUGAS" belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Dari segi Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995, bagi koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam maka harus dibuatkan laporan keuangan tersendiri yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Perubahan Kekayaan Bersih. Untuk itu disusun laporan keuangan KPRI "LUGAS" sesuai PSAK No.27 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 yang diharapkan dapat memperbaiki laporan keuangan KPRI "LUGAS".

kata kunci: PSAK No.27, PP No.9 tahun 1995, KPRI "LUGAS"

